BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia, Pemerintahan Pusat maupun Daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah di beri kewenangan untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi (Wawan dan Lia: 2009).

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengurus keuangan ini diantaranya

adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 (Wawan dan Lia:2009).

Dengan adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi serta akuntabilitas memaksa pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga berlaku pada organisasi sektor publik lainnya, seperti organisasi publik nonpemerintah. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat. (Indra Bastian:2010).

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut (PP No.60 Thn 2008).

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendaian Intern maka dilakukan Pengawasan Intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilain independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah (PP No.60 Thn 2008)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh (LAN2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengeloalaan keuangan negara/daerah. (Abdul Rohman:2007)

Manajemen Pemda, dituntut untuk membangun instrumen informasi keuangan yang memadai dan andal agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan yang rasional dalam mekanisme perencanaan dan pengendalian. Informasi keuangan tersebut tidak saja diperlukan untuk keperluan manajemen (intern) Pemda, melainkan juga memenuhi keperluan pihak di luar (extern) Pemda dalam rangka pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja (Abdul Rohman 2007)

Disisi lain, untuk mewujudkan kinerja Pemda yang sesuai dengan value for money (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan peran fungsi aparat pemeriksa fungsional pemerintah di lingkungan Pemda (Mardiasmo 2002). Fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern (*internal auditing function*) yang merupakan suatu fungsi penilaian independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boynton dan Kell 2006) dalam Abdul Rohman(2009).

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah." Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Tulisan ini berisikan analisis mengenai berbagai alternatif berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi audit internal serta formulasi sinerji fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan *good governance* yang merupakan idaman dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia (Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004).

Sejalan dengan hal tersebut ditemukan beberapa fenomena yang nampak dan dapat diteliti, seperti halnya fenomena yg terjadi pada Pemerintah Kota Bandung. Antara lain fenomena mengenai pengawasan intern. Dari tabel 1.1 Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 dilihat dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern salah satunya di Provinsi Jawa Barat pada Kota Bandung, masih terdapat sebanyak 13 kasus yang menunjukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Pada umumnya kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kasus kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan, belum sepenuhnya memahami ketentuan, dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait. (Sumber: LHP BPK RI, 2011)

Hal ini mengakibatkan terjadi kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 10 kasus yang terjadi karena beberapa penyebab yakni:

- Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat,
- Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan,
- Entitas terlambat menyampaikan laporan,
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai,
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

(Sumber: LHP BPK RI,2011)

Terdapat pula kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 3 kasus yang mana terjadi karena beberapa penyebab, yakni:

- Perencanaan kegiatan tidak memadai
- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja
- Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD
- Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan /biaya

(Sumber: LHP BPK RI,2011)

Faktor utama yang melatar belakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

Tabel 1.1
Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

(nilai dalam jutaan rupiah)

No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
		Jmlh Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	2	3	4	6	7
1	Kota Bandung	13	10	3	-

(Sumber: LHP BPK RI, 2011)

Fenomena lain yang terjadi pada Pemerintah Kota Bandung adalah fenomena mengenai fungsi pemeriksaan intern. Berdasarkan Tabel 1.2 Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011, Pada tahun 2011 Kota Bandung mendapatkan rekomendasi sebanyak 171. Rekomendasi tersebut diperoleh dari status pemantauan tindak lanjut yang terdiri dari: 1) Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 62 kasus; 2) Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 19 kasus ; dan 3) Belum ditindaklanjuti sebanyak 90 kasus. Nilai rekomendasi berdasarkan jumlah kasus tersebut yakni 40.994,570, namun hasil dari rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan baru sebesar 1.174,650. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi audit internal perlu memantau pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hasil pemeriksaan sebagai upaya tindak lanjut untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik. (LHP BPK RI 2011)

Fungsi audit internal dalam hal ini yang berperan dalam melakukan pemeriksaan internal yaitu inspektorat daerah kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan urusan pemerintah desa, pelaksanaan TP dan PHLN, dan pengusutan atas laporan pengaduan masyarakat (PP/79/2005).

Tabel 1.2
Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun 2005 s.d. Tahun 2011

(nilai dalam juta rupiah dan ribu valas)

No	Entitas	Periode	Rekomendasi		Status Pemantuan Tindak Lanjut						Rekomendasi yang telah ditindak lanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset negara/ daerah/perusahaan.
					Sesuai dengan rekomendasi		Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut		Belum ditindak lanjuti		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	Kota Bandung	2005-2008	167	74.195,77	103	26.634,68	61	47.372,56	3	188,53	17.340,18
		2009	165	3.861,76	82	3.646, 34	42	172,71	41	43,61	3.660,91
		2010	41	771,81	25	674,55	13	89,15	3	8,10	676,331
		2011	171	40.994,57	62	269,05	19	324,31	90	40.401,21	1.174,65
		jumlah	544	119.823,93	272	31.223,72	135	47.958,74	137	40.641.46	22.825,09

(Sumber: LHP BPK RI,2011)

Sejalan dengan hal tersebut, terdapat fenomena kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung yang bertempat di Gedung Rosada Balai Kota Jl. Wastukencana Bandung, *Selasa 12 April 2011* dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPKP Jabar dengan Pemerintah Kota Bandung. Dalam sambutannya Walikota Bandung Dada Rosada mengemukakan kritik tajam terhadap jajarannya di lingkungan Pemkot Bandung yang cenderung memiliki komitmen rendah terhadap kinerja mereka, keluhan ini nampak sangat beralasan karena laporan keuangan pemkot Bandung tahun 2010 oleh BPK mendapat opini disclaimmer. Dada Rosada memberikan contoh sederhana bahwa mereka yang memiliki uang (anggaran), mereka yang merencanakan, kemudian melaksanakannya akan tetapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik/ memberikan laporan atas kegiatannya, adalah merupakan sesuatu yang tidak logis. Oleh karena itu Walikota menekankan kepada jajarannya bahwa dengan nota kesepahaman ini para pejabat terkait harus mau berkoordinasi dengan BPKP dan bertanya apabila ada yang belum dimengerti dalam hal manajemen pengelolaan keuangan negara/ daerah, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan yang berakibat fatal bagi kinerja Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota Bandung **(**Ruzuar:2011).

Tabel 1.3
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Entitas pemerintah Daerah Prov. Jawa Barat	Opini 2006	Opini 2007	Opini 2007	Opini 2008	Opini 2009	Opini 2010	Opini 2011
LKPD Pemerintah Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP

(Sumber: LHP BPK RI, 2011)

*WDP = Wajar Dengan Pengecualian
*TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Lalu pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Sumber: LHP BPK RI, 2011).

Fenomena lain mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung diantaranya beberapa program pemerintah yang sepenuhnya belum terlaksana dengan baik. Seperti contohnya pada Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan Wajib Dan Pilihan APBD Kota Bandung Tahun 2011**,** pada Urusan Pendidikan ; Program Pendidikan Menengah ; Kegiatan penerapan E-Learning Berbasis Web di SMA 2 (Banprov) yg ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ternyata tidak terealisasi dikarenakan adanya perbedaan Proposal Sekolah dengan prosedur pengelolaan keuangan sehingga perbaikan yang dilakukan pada DPA Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Padahal untuk kegiatan ini telah dianggarkan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000. (Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011).

Lalu pada Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Bandung Tahun 2011, dengan Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Urusan Pendidikan ; Program Pendidikan Menengah dari 11

jumlah kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.306.905.997, hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3.849.144.650 mendapatkan persentase sebesar 61,03%.

Tidak hanya itu pada Capaian Kinerja RPJMD Kota Bandung Tahun 2011 dalam Indikator Angka Melek Huruf (AMH), dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 99,55% (sumber: BPS). AMK diperoleh dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca, menulis, dan berhitung huruf latin dan/atau huruf lainnya. AMH ini cenderung konstan karena sudah mendekati 100%. AMH yang masih belum mencapai 100% menunjukkan masih adanya masyarakat Kota Bandung yang buta huruf (0,45%). Hal ini disebabkan masih adanya penduduk lanjut usia yang belum bisa membaca dan menulis namun tidak dapat ditingkatkan lagi karena faktor usia. Peningkatan AMH sebesar 0,01% dibanding dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya penguatan pada kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) PNFI, sosialisasi oleh penilik pendidikan non formal, serta pemberian BAWAKU Sekolah yang berkesinambungan bagi warga belajar pendidikan non formal. (Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011)

Tabel 1.4
Matriks Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Belanja Langsung Urusan Wajib Dan Pilihan APBD Kota Bandung Tahun 2011

No			Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keluaran (Output)	Hasil Outcome	Permasalahan/ Keterangan	SKPD
1			Urusan Pendidikan							
	3		Program Pendidikan menengah							
		11	Kegiatan Penerapan Sistem ELearning Berbasis Web di SMA 2 (Banprov)	1.000.000.000	-	00,00%	Kegiatan Penerapan Sistem ELearning Berbasis Web di SMA 2 (Banprov) tidak terealisasi	-	Adanya perbedaan Proposal Sekolah dengan prosedur pengelolaan keuangan sehingga perbaikan yang dilakukan pada DPA Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan	Disdik

(Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011)

Tabel 1.5
Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi
Berdasarkan Misi Pembangunan
Kota Bandung Tahun 2011

No	MISI/URUSAN/PROGRAM	Jumlah Kegiatan	Anggaran		Percentase (%)
			Anggaran	Realiasi	
1	Mengembangkan Sumber Daya manusia	152	385.374.812.482	344.492.285.077	89,39
	1 Pendidikan	54	291.545.319.527	267.233.098.661	91,66
	3 Program Pendidikan Menengah	11	6.306.905.997	3.849.144.650	61,03

(Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011)

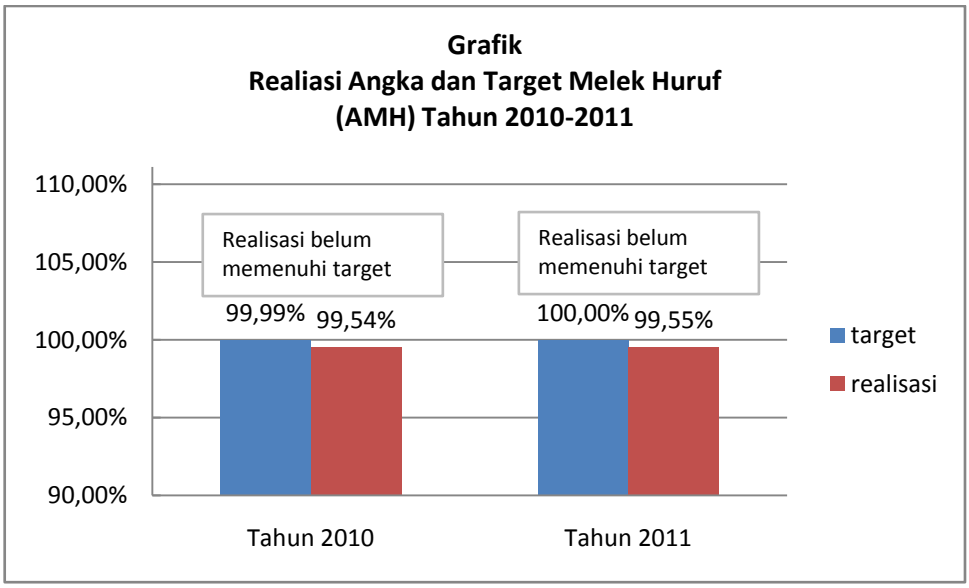
Tabel 1.6
Matriks Capaian Kinerja Program RPJMD Tahun 2011

No	Indikator	Tahun 2011		Hasil			SKPD
		Target	Realisasi	TST	TMT	TT	
1	**Urusan Pendidikan**						
20	Angka Melek Huruf	100%	99,55 %			V	Disdik, BPS

(Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011)

Keterangan:

TST : Tercapai Sesuai Target
TMT : Tercapai Melebihi Target
TT : Tidak Tercapai



Gambar 1.1
Grafik Realisasi Angka dan Target Melek Huruf (AMH) Tahun 2010-2011

Berdasakan gambaran pada latar belakang ini, peneliti akan meneliti sejauh mana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah dan fungsi pemeriksaan intern yang baik dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, dengan mengambil judul

“Pengaruh Pengawasan Intern dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terjadi, yakni:

1. Walikota Bandung Dada Rosada mengemukakan kritik tajam terhadap jajarannya di lingkungan Pemkot Bandung yang cenderung memiliki komitmen rendah terhadap kinerja mereka.
2. Jajaran Pemkot Bandung tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi-nya dengan baik, sehingga mempengaruhi kinerjanya yang berdampak pada laporan kinerja dan keuangan.
3. Dalam menjalankan programnya, jajaran Pemkot Bandung kurang melakukan pengawasan dan tidak dilakukan evaluasi atau pemeriksaan kembali sehingga ketercapaian suatu program jauh dari sasaran yang berdampak menurunnya kinerja Pemerintah Daerah Pemkot Bandung.
4. Masih banyaknya program Pemerintah yang tidak terealisasi dikarenakan persentase pencapaiannya tidak sesuai dengan target capaian kinerja
5. Masih banyak temuan BPK/Inspektorat yang telah direkomendasikan, namun belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
2) Bagaimana pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
3) Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung.
4) Bagaimana pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).
5) Bagaimana pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).
6) Bagaimana pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dengan diadakannya penelitian ini, agar dapat menelaah seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah, dan sejauh mana tindak lanjut dari hasil penelitian.

1.3.2 Tujuan penelitian

1) Mengetahui pelaksanaan pengawasan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
2) Mengetahui pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
3) Mengetahui pelaksanaan kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung
4) Mengetahui besarnya pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern secara bersama-sama terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).
5) Mengetahui besarnya pengaruh pengawasan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).
6) Mengetahui besarnya pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti, adalah sebagai acuan dalam pemenuhan tugas akhir / skripsi, selain itu penelitian ini pula memberikan pemahaman bagaimana ketercapaian program pemerintah dilakukan faktor-faktor apa yang mendukung untuk dapat menjalankan suatu pemerintahan daerah yang baik.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan lagi agar menjadi lebih baik, selain itu penelitian ini pun dapat menjadi bahan acuan mengenai banyaknya bidang-bidang pada akuntansi sektor publik yang dapat dijadikan untuk bahan penelitian, karena tidak dipungkiri mata kuliah ini sangat kuat cangkupannya.

Bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas-dinas yang menjalankan program Pemerintah Kota Bandung sendiri, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, mengenai bagaimana pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah secara optimal, serta pencapaian keberhasilan suatu program dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah itu sendiri.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini berfungsi sebagai bukti empiris bagi fakultas ekonomi di bidang akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pengawasan intern dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Dinas di Pemerintah Kota Bandung, yaitu:

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan
   Jl. Cianjur No.34 Bandung, Telp.(022) 7278853
2. Dinas Kebakaran
   Jl. Sukabumi No.17 Bandung, Telp.022-7207113
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
   JL. Ahmad Yani No. 227 Bandung, Telp.62 22 7210768
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   Jl. Ambon No.1 Bandung, Telp.022-4209891
5. Dinas Kesehatan
   Jl. Supratman No.73 Bandung, Telp.022-4203752 / 022-7202210
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
   Jl. Wastukencana No 2 Bandung, Telp.(022) 4234892
7. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan
   Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung, Telp.7308358
8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan
   Jl. Ambon No.1 A Bandung, Telp.022-4231921
9. Dinas Pemuda dan Olah Raga
   Jl.Aceh No.51 Telp.(022)-4212656
10. Dinas Pendapatan
    Jl. Wastukencana No.2 Bandung, Telp.(022) 4235052
11. Dinas Pendidikan
    Jl.A.Yani No. 239 Bandung, Telp.022-7106568
12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    Jl. Wastukencana No.2 Bandung,
13. Dinas Perhubungan
    Jl. Soekarno Hatta No 205 Bandung, Telp.022 5220768
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
    Jl. Arjuna No.45 Bandung, Telp.6015102
15. Dinas Sosial
    Jl. Sindang sirna no 40 Bandung, Telp.2013139
16. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
    Jalan Cianjur No. 34 Bandung, Telp.(022) 7217451
17. Dinas Tenaga Kerja
    Jl. RE. Martanegara No. 4 Bandung, Telp.022-7311330 / 022-7313130

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.7
Pelaksanaan Penelitian
Pada Dinas di Pemerintah Kota Bandung

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agustus 2012
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Mengambil formulir penyusunan usulan penelitian	■					
	2. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■				
	3. Membuat outline dan usulan penelitian	■	■				
	4. Menentukan tempat penelitian	■	■				
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Mengajukan outline dan usulan penelitian	■	■	■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■	■	■	■		
	3. Penelitian di perusahan			■	■		
	4.Penyusunan skripsi			■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Menyiapkan draf skripsi				■	■	
	2. Sidang akhir skripsi				■	■	■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi				■	■	■
	4. Penggandaan skripsi				■	■	■